

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kartu Prakerja pada awalnya dirancang sebagai upaya pemerintah yang bertujuan untuk menyiapkan angkatan kerja yang belum dapat diserap oleh pasar kerja melalui penyediaan pelatihan agar bisa membekali kompetensi kerja (*soft skill*), peningkatan kompetensi kerja (*upskilling*), dan alih kompetensi kerja (*reskilling*) disesuaikan dengan minat serta kebutuhan pesertanya. Pelatihan tersebut difasilitasi melalui berbagai wadah, baik secara langsung di lembaga kursus maupun secara daring dengan melibatkan sejumlah platform digital, seperti Ruangguru, Tokopedia, dan lainnya. Akan tetapi, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sasaran program ini mengalami perluasan, di mana pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) juga mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020).

Pandemi Covid-19 secara resmi diumumkan di Indonesia pada Maret 2020 telah memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Kebijakan pembatasan mobilitas seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penutupan sektor usaha, serta penghentian kegiatan produksi, mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menyebabkan lonjakan drastis pada angka pengangguran di tahun 2020 dan menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam kondisi tersebut, bantuan pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat (Ngadi et al., 2020).

Bantuan dari pemerintah memiliki peran penting dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik melalui kebijakan regulatif yang mendorong terciptanya kesempatan kerja maupun melalui pemberian dukungan langsung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Setiap kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah berpotensi memberikan

dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga penting untuk merancang solusi yang menjaga kestabilan ekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi. Salah satu bentuk bantuan pemerintah adalah Program Kartu Prakerja, yang menyediakan pendanaan pelatihan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka peningkatan keterampilan kerja. Program ini dirancang untuk individu yang tengah mencari kerja maupun individu yang terpengaruh oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kompetensi. Dengan demikian, Kartu Prakerja berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam usaha untuk memajukan kualitas tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan permintaan di pasar kerja (Rawie & Samputra, 2020).

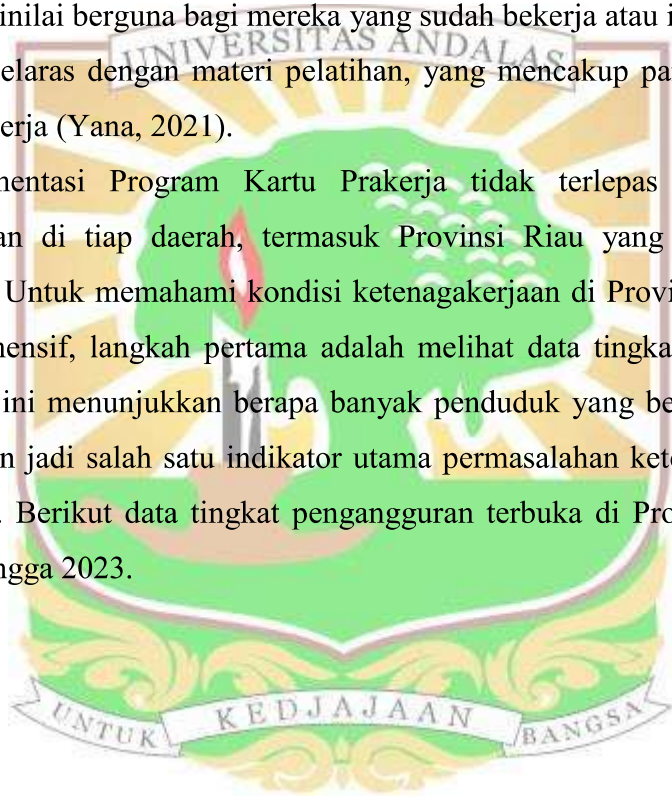
Penerima manfaat Program Kartu Prakerja tidak terbatas pada pencari kerja, tetapi mencakup pula pekerja yang ingin mengembangkan kompetensinya, termasuk para karyawan dan pegawai. Secara umum, setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia, yang berusia setidaknya 18 tahun dan tidak dalam kondisi menempuh pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, memiliki peluang untuk mengikuti dalam program ini. Hal ini mencerminkan pendapat pemerintah bahwa akses terhadap pendidikan dan pelatihan seharusnya terbuka untuk semua tanpa memandang usia. Meskipun demikian, prioritas utama diberikan kepada pencari kerja muda, terutama lulusan SMA/SMK, mengingat pengalaman pertama memasuki pasar kerja dipandang sebagai fondasi penting dalam pembentukan dan pengembangan karier di masa mendatang (Riza & As'ari, 2024).

Program Kartu Prakerja memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang, maka mereka lebih siap dan diutamakan dalam pasar kerja, kemudian pada gilirannya dapat membuka lebih banyak kesempatan karier. Program ini bukan sekadar memberikan bantuan keuangan kepada para penerimanya, tetapi juga dikembangkan untuk mendidik masyarakat agar tidak selalu bergantung pada dukungan pemerintah. Dengan adanya berbagai jenis pelatihan yang ditawarkan, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan menjadi langkah awal menuju peningkatan

taraf hidup ekonomi yang lebih baik (Anggara & Auwalin, 2024).

Manfaat yang dirasakan peserta Program Kartu Prakerja meliputi peningkatan pengetahuan, tersedianya materi pelatihan yang aplikatif, kesesuaian materi dengan pekerjaan yang sedang dijalani, serta relevansinya dengan pekerjaan yang diharapkan di masa depan. Pendapat peserta terkait keuntungan dari pelatihan ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pelatihan dinilai bermanfaat bagi mereka yang berencana membuka atau mengembangkan usaha, yang umumnya merupakan calon pengusaha atau agen perusahaan. Kedua, pelatihan ini dinilai berguna bagi mereka yang sudah bekerja atau ingin berkarir di bidang yang selaras dengan materi pelatihan, yang mencakup para pekerja serta calon tenaga kerja (Yana, 2021).

Implementasi Program Kartu Prakerja tidak terlepas dari dinamika ketenagakerjaan di tiap daerah, termasuk Provinsi Riau yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk memahami kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau secara lebih komprehensif, langkah pertama adalah melihat data tingkat pengangguran terbuka. Data ini menunjukkan berapa banyak penduduk yang belum terserap di pasar kerja dan jadi salah satu indikator utama permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau dari tahun 2018 hingga 2023.



**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahunan) Provinsi Riau
Tahun 2018-2023**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Tahunan) Menurut Kabupaten/Kota					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	6,05	4,88	5,21	2,06	2,66	2,49
Indragiri Hulu	4,70	4,96	4,91	3,32	2,53	2,47
Indragiri Hilir	4,08	4,76	4,35	2,66	1,50	1,71
Pelalawan	5,30	4,88	5,99	2,34	2,73	2,26
Siak	4,13	4,33	5,80	4,34	6,11	5,82
Kampar	5,45	5,98	6,15	4,27	3,62	3,38
Rokan Hulu	5,40	4,71	4,42	2,25	3,62	3,45
Bengkalis	10,05	9,62	9,31	6,63	7,18	7,09
Rokan Hilir	6,09	4,96	4,80	3,25	4,55	4,42
Kepulauan Meranti	6,84	6,19	7,94	4,43	5,50	5,17
Pekanbaru	8,42	7,86	8,56	8,29	6,40	6,20
Dumai	6,04	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15
RIAU	6,20	5,97	6,32	4,42	4,37	4,23

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami tren yang berfluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018 tercatat 6,20 persen, menurun menjadi 5,97 persen pada tahun 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19, angka pengangguran melonjak pada tahun 2020 menjadi 6,32 persen, yang merupakan puncak dampak pandemi terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Setelah itu, angka pengangguran menurun secara bertahap menjadi 4,42 persen pada tahun 2021, 4,37 persen pada tahun 2022, dan 4,23 persen pada tahun 2023. Tren Penurunan tersebut mencerminkan adanya pemulihan dan membaiknya dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Riau pasca pandemi Covid- 19. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau belum sepenuhnya mencerminkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan telah terselesaikan karena masih terdapat angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Kondisi pasar kerja tidak hanya dapat dianalisis melalui tingkat pengangguran, tetapi juga melalui jumlah penduduk yang bekerja. Data ini memperlihatkan berapa banyak penduduk yang benar-benar terserap dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau selama tahun 2018 hingga 2023 perlu diperhatikan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Tahun	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Provinsi Riau Tahun 2018-2023
2018	15,89%
2019	16,24%
2020	16,62%
2021	17,31%
2022	17,42%
2023	16,51%

Sumber : Data Diolah dari BPS Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat kondisi ketenagakerjaan mengalami dinamika yang cukup signifikan. Persentase penduduk yang bekerja di tahun 2018 sebesar 15,89 persen, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 16,24 persen. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan ketersediaan lapangan kerja serta keadaan ekonomi yang relatif stabil sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2020, jumlah penduduk bekerja kembali meningkat menjadi 16,62 persen, meskipun pada tahun tersebut mulai terjadi guncangan akibat pandemi Covid-19. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pasar kerja masih relatif bertahan pada awal pandemi. Tahun berikutnya, yaitu 2021, jumlah penduduk yang bekerja meningkat menjadi 17,31 persen, menandakan adanya pemulihan lapangan kerja seiring dengan mulai dilonggarkannya pembatasan aktivitas ekonomi. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk bekerja meningkat tipis menjadi 17,42 persen. Akan tetapi, di tahun 2023 jumlah penduduk yang bekerja justru terjadi penurunan cukup signifikan

menjadi 16,51 persen. Tabel 1.2 memperlihatkan daya serap tenaga kerja di Provinsi Riau masih terbatas dan belum optimal, bahkan mengalami kontraksi kembali pada tahun 2023. Keterbatasan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum optimalnya kemampuan pasar kerja dalam menyerap pertambahan angkatan kerja, baik yang baru memasuki dunia kerja maupun yang telah meningkatkan kompetensinya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peluang kerja di Provinsi Riau bukan hanya ditentukan oleh dinamika perekonomian serta tersedianya lapangan kerja, namun juga oleh kualitas tenaga kerja yang dimiliki masyarakat. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan, bertambahnya jumlah angkatan kerja tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas kompetensi dasar tenaga kerja. Kualitas sumber daya manusia sangat terkait dengan tingkat pendidikan, karena pendidikan jadi landasan utama dalam membentuk kemampuan, produktivitas, serta kesiapan individu dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi dan tuntutan pasar kerja. Maka, untuk memahami kondisi peluang kerja di Provinsi Riau secara lebih menyeluruh, penting untuk melihat terlebih dahulu kondisi pendidikan masyarakat yang direpresentasikan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2018	8,92
2019	9,03
2020	9,14
2021	9,19
2022	9,22
2023	9,32

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025

Mengacu pada Tabel 1.3, RLS Provinsi Riau meningkat selama periode 2018 hingga 2023. Nilai RLS yang semula berada pada angka 8,92 tahun meningkat menjadi 9,32 tahun, sehingga rata-rata lama pendidikan penduduk

bertambah sekitar 0,40 tahun atau setara dengan sekitar empat hingga lima bulan tambahan masa sekolah dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam capaian pendidikan masyarakat, meskipun lajunya masih tergolong lambat. Secara interpretatif, nilai RLS sebesar 9,32 tahun menggambarkan bahwa rata-rata lama pendidikan yang ditempuh penduduk Provinsi Riau setara dengan penyelesaian pendidikan tingkat SMP, dengan sebagian penduduk telah melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Kenaikan RLS tersebut menggambarkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di Riau, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar melalui program wajib belajar dan peningkatan sarana pendidikan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target pembangunan nasional yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga jenjang pendidikan menengah atas, angka tersebut masih menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk Riau belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat berimplikasi pada keterbatasan kemampuan tenaga kerja dalam menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan dunia kerja modern, terutama di sektor-sektor formal yang menuntut keahlian teknis dan adaptif (Muttaqin, 2018). Selain tingkat pendidikan, karakteristik demografis seperti usia juga memiliki peran penting untuk menentukan kesempatan kerja yang dimiliki individu.

Usia menggambarkan tingkat produktivitas individu dalam pasar kerja. Kelompok usia produktif umumnya memiliki kapasitas fisik, mental, serta fleksibilitas yang lebih tinggi dalam beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Sebaliknya, kelompok usia yang terlalu muda sering kali masih minim pengalaman kerja, sedangkan kelompok usia yang mendekati usia nonproduktif cenderung menghadapi keterbatasan fisik maupun preferensi perusahaan yang lebih memilih tenaga kerja pada usia prima. Dengan demikian, struktur usia angkatan kerja dapat memengaruhi peluang seseorang untuk terserap dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan tingkat kematangan, pengalaman, dan kemampuan adaptasi antar kelompok usia dapat menyebabkan variasi dalam tingkat peluang kerja yang dimiliki individu setelah mengikuti program pelatihan (Anggara & Auwalin, 2024).

Selain usia, peluang kerja individu juga dipengaruhi oleh jenis kelamin sebagai salah satu karakteristik demografis. Perbedaan peran sosial, akses terhadap pendidikan, dan peluang kerja antara perempuan dan laki-laki sering kali menimbulkan kesenjangan dalam partisipasi pasar tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja cenderung lebih besar daripada perempuan. Perbedaan tersebut diperkirakan tidak terlepas oleh sejumlah faktor, seperti norma sosial yang masih berlaku, beban tanggung jawab domestik, serta keterbatasan perempuan dalam mengakses pekerjaan formal. Keadaan ini memperlihatkan bahwa jenis kelamin sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menganalisis peluang kerja.

Selain karakteristik individu, seperti jenis kelamin, aspek geografis berupa wilayah tempat tinggal juga memiliki peranan penting terhadap peluang seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan perdesaan sering kali menimbulkan perbedaan dalam ketersediaan kesempatan kerja. Kawasan perkotaan umumnya didukung oleh aktivitas ekonomi yang lebih beragam, infrastruktur yang lebih memadai, juga peluang kerja yang lebih banyak. Di sisi lain, penduduk yang berada di daerah perdesaan cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal, sehingga banyak yang bekerja pada sektor informal yang tingkat produktivitasnya relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa wilayah tempat tinggal dapat memengaruhi akses individu terhadap peluang kerja. Maka, variabel wilayah tempat tinggal sebagai faktor penting untuk diperhatikan dalam menganalisis peluang kerja di Provinsi Riau.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, penggunaan internet juga sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan peluang kerja individu. Internet bukan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga untuk sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan, mengikuti pelatihan daring, serta mengembangkan usaha secara digital. Individu yang memiliki akses terhadap internet dan mampu memanfaatkannya dengan baik cenderung meningkatkan peluang kerja yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan karena

mereka bisa dengan mudah mengakses informasi pasar kerja dan meningkatkan keterampilan melalui berbagai platform pembelajaran online (Prasetyo & Rachmawati, 2022). Dalam konteks Program Kartu Prakerja, penggunaan internet menjadi semakin relevan karena sebagian besar pelatihan diselenggarakan secara daring melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, individu yang memiliki akses internet yang baik berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar dari program tersebut dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Di sisi lain, Program Kartu Prakerja yang menjadi fokus penelitian ini juga perlu ditinjau berdasarkan perkembangan jumlah penerima manfaat di Provinsi Riau. Berdasarkan Kemnaker (2023) jumlah penerima Program Kartu Prakerja di Provinsi Riau mengalami fluktuasi selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020 (batch 1–11), jumlah penerima mencapai 151.261 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 (batch 12–22) menjadi 161.967 orang. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah penerima menurun menjadi 145.659 orang, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 (batch 48–62) menjadi 23.503 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat Program Kartu Prakerja di Provinsi Riau mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penerima pada awal pelaksanaan program tidak berlanjut pada periode berikutnya, sehingga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Kartu Prakerja bersifat dinamis selama periode pelaksanaannya. Perubahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui apakah partisipasi dalam Program Kartu Prakerja berpengaruh terhadap peluang kerja masyarakat di Provinsi Riau. Hingga saat ini, kajian mengenai Program Kartu Prakerja sebagian besar dilakukan pada tingkat nasional, sedangkan penelitian yang secara khusus berfokus pada Provinsi Riau masih terbatas, sehingga provinsi Riau menjadi daerah yang tepat untuk menilai kontribusi Program Kartu Prakerja terhadap peluang kerja. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Program Kartu Prakerja, Faktor Demografi, dan Penggunaan Internet terhadap Peluang Kerja di Provinsi Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah program kartu prakerja berpengaruh terhadap peluang kerja di provinsi Riau?
2. Apakah faktor demografi (pendidikan, usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal) berpengaruh terhadap peluang kerja di provinsi Riau?
3. Apakah penggunaan internet berpengaruh terhadap peluang kerja di provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengukur pengaruh program kartu prakerja terhadap peluang kerja di provinsi Riau secara statistik.
2. Mengukur pengaruh faktor demografi (pendidikan, usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal) terhadap peluang kerja di provinsi Riau secara statistik.
3. Mengukur pengaruh penggunaan internet terhadap peluang kerja di provinsi Riau secara statistik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam praktik, dengan manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian ekonomi, terutama pada bidang ekonomi ketenagakerjaan. Temuan yang diperoleh diharapkan bisa menambah pemahaman serta memperluas pengetahuan mengenai pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap peluang kerja di Provinsi Riau. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah dan landasan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

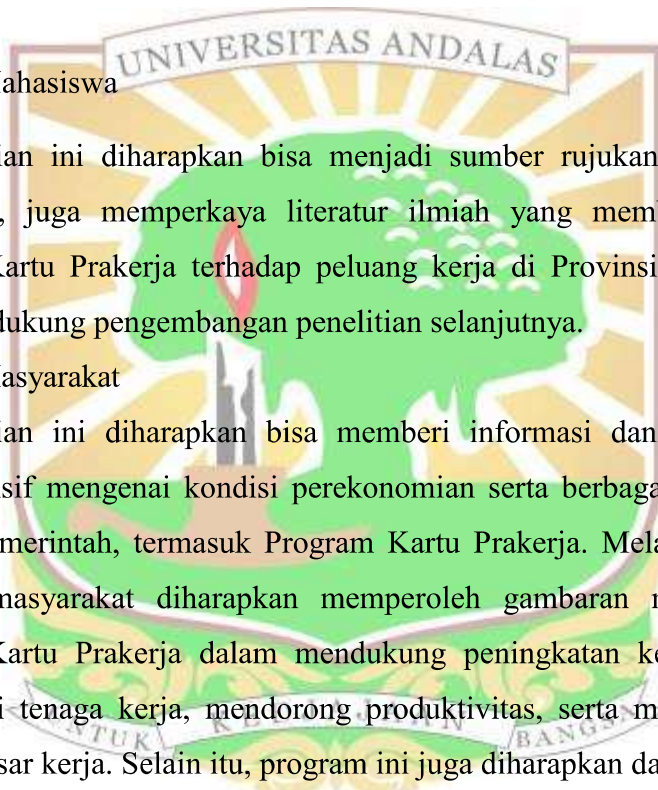
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan Program Kartu Prakerja, khususnya untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi peserta dan meningkatkan peluang kerja. Pemerintah daerah, terutama di Provinsi Riau, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam perumusan program pelatihan kerja yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan wilayah setempat.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan akademis bagi mahasiswa, juga memperkaya literatur ilmiah yang membahas pengaruh Program Kartu Prakerja terhadap peluang kerja di Provinsi Riau, sehingga dapat mendukung pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan referensi yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian serta berbagai kebijakan dan inisiatif pemerintah, termasuk Program Kartu Prakerja. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran mengenai peran Program Kartu Prakerja dalam mendukung peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, mendorong produktivitas, serta memperkuat daya saing di pasar kerja. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pengembangan kewirausahaan bagi tenaga kerja dan pencari kerja.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kartu prakerja terhadap peluang kerja di provinsi Riau. Variabel dependen yang dianalisis yaitu peluang kerja di Provinsi Riau, sedangkan variabel independen yaitu program kartu prakerja, faktor demografi (pendidikan, usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal), dan penggunaan internet. Sumber data yang dipakai berasal dari badan pusat statistik (BPS) yaitu SAKERNAS pada tahun 2023.

